

MENCARI FORMAT BARU PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI

Ahmad
Tanto Sukardi
ahmadump@yahoo.co.id

ABSTRACT: Nowadays Indonesian people are trying to solve their problems on finding their nasional identity. And this is not an easy job since Indonesia consists of many different ethnics, social and culture in which they have their own characteristic. Moreover, an invansive wave of globalization treats this country to find their national identity. This globalization treat gives much influence on the cultural changing among the people and ethnic in Indonesia. Indeed, rather than give a positive impact, this cultural change gives a negative impact on this country especially in shaping the national Identity. Thus, a new concept of Education which is oriented to the multicultural one is highly needed to solve this problem and to save Indonesia from the Globalization expansion. This paper aimed at exploring the new concept of Multicultural education in Indonesia to face Globalization as well as finding the national identity.

Key word: New Concept, Multicultural, Globalization

PENDAHULUAN

Sejak berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merupakan suatu negara kebangsaan (*nation state*) yang dibangun atas dasar masyarakat multi etnis dan budaya ke dalam suatu bentuk kesatuan nasional. Budaya etnis yang sangat beragam itu juga berkembang menurut dinamika sejarah yang dialami masing-masing penduduknya yang ada di berbagai daerah. Kondisi masyarakat dan budaya yang pluralistik ini diintegrasikan dalam bingkai nasionalisme yang mengikat solidaritas lokal menjadi solidaritas nasional. Proses transformasi semacam itu berlangsung dalam masyarakat yang mengarah pada upaya mewujudkan budaya nasional baru yang disebut dengan budaya Indonesia modern.

Dalam kenyataannya proses transformasi dari masyarakat agraris tradisional menuju masyarakat modern diwarnai dengan kemajemukan unsur budaya yang cair dan terbuka. Kondisi demikian menyebabkan proses dialog antar unsur kebudayaan yang mengarah pada format baru itu, menjadi sangat rumit dan tertatih-tatih. Berkaitan dengan itu, Kayam (1981: 19) menyatakan, bahwa dalam proses transformasi itu harus selalu dihindari suatu strategi kebudayaan yang memaksakan homogenitas yang monolitik dari kenyataan kemajemukan. Dari sinilah kemudian muncul ide dan gagasan perlunya disusun format baru pendidikan yang berbasis pada

multikultural yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Untuk dapat menetapkan pendidikan multikultural yang sesuai, maka sangat perlu untuk berkaca pada pengalaman sejarah masa lampau. Pelajaran pahit dari pengalaman sejarah telah membawa kelompok-kelompok etnis berproses menuju ke arah pembentukan negara bangsa, bukan negara wangsa. Dua istilah itu disepakati sebagai pedoman untuk *nation state* dan *national state*. Istilah yang pertama bertitik tolak pada kesatuan wilayah atau *teritory* dengan keragaman suku, sementara istilah yang kedua menitikberatkan pada suatu suku (*ethnisity*) dengan keragaman wilayah. Dengan pemahaman nasionalisme semacam itu, rakyat pribumi dengan beragam budaya dan etnis melancarkan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Keberhasilan perjuangan dengan paham nasionalisme semacam itu kemudian menjadi prasyarat bagi kehidupan Indonesia mendeka yang dirangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Parakitri, 1933:7). Melihat kenyataan dewasa ini setelah lebih dari enam dekade kemerdekaan Republik Indonesia dilalui, dirasa perlu dilakukan berbagai upaya penyegaran kepada generasi muda melalui pendidikan yang berbasis multikultural yang berorientasi kepada upaya mempertahankan idealisme Bhinneka Tunggal Ika yang tampak semakin jauh dari kehidupan masyarakat.

TANTANGAN GLOBALISASI BAGI MASYARAKAT MULTI KULTURAL

Bidang pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, di samping juga merupakan faktor penentu bagi perkembangan sosial dan ekonomi kearah kondisi yang lebih baik. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Mengingat begitu pentingnya peran pendidikan bagi kehidupan masyarakat, maka pemerintah dewasa ini sangat memperhatikan segala aspek pendidikan yang ada untuk dikembangkan. Dengan harapan, agar pendidikan di Indonesia bangkit dari keterpurukan dan menjadi garda yang terdepan dalam pembangunan bangsa. Bentuk perhatian ini secara khusus tercermin dalam kebijakan pemerintah, antara lain yang berupa pemenuhan sarana perundang-undangan, peningkatan anggaran pendidikan, sampai pada upaya penyempurnaan berbagai regulasi yang berlaku untuk memajukan pendidikan nasional.

Kerja keras semacam itu tentu tidak lepas dari upaya melaksanakan amanat konstitusi yang diidamkan oleh para *founding father* negara ini. Pasal 31 ayat (2) *Undang-Undang Dasar 1945* mengisyaratkan, bahwa “*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”. Sementara itu pada Pasal 31 ayat (3) menyatakan, bahwa “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*”.

Sebagai upaya melaksanakan amanat konstitusi itulah, maka pada saat ini pemerintah pusat maupun daerah tengah berkonsentrasi secara penuh terhadap kemajuan dalam pembangunan pendidikan, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang diyakini sebagai faktor penunjang akselerator kemajuan daerah. Pembangunan bidang pendidikan di setiap daerah bertumpu kepada tiga pilar Kebijakan Strategis Departemen Pendidikan Nasional, yaitu: 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2)

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan 3) Tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik (Depdiknas, 2008: 5). Ketiga pilar itulah yang menjadi dasar pengembangan sektor pendidikan yang menyeluruh di Indonesia dewasa ini.

Dengan digulirkannya otonomi daerah yang secara resmi dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, maka pengembangan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi yang secara bertahap mengarah kepada penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas. Dalam bidang pendidikan, tuntutan reformasi lebih mengarah kepada proses desentralisasi pengelolaan pendidikan (Supriadi, 2000: 142). Salah satu dampak negatif berkembangnya egosentrisme warga daerah, dengan sikap tidak diakuiinya eksistensi kelompok masyarakat yang berasal dari daerah lain. Contoh kasus di Aceh telah terjadi pengusiran terhadap warga yang berasal dari daerah lain. Istilah putra daerah juga telah dimaknai dengan pengkotakkan ekstrim dan wawasan yang sempit. Bahkan tidak jarang merebaknya peristiwa konflik antar komunitas di Poso, Ambon, Kalimantan Barat dan beberapa daerah lain. Semua itu terjadi karena faktor ekonomi dan kemiskinan, kurangnya pemahaman terhadap perbedaan etnis, budaya, dan agama lain, serta pengaruh budaya global yang cenderung agresif dan penuh persaingan (Natsir, 2010: 1).

Dewasa ini arus globalisasi telah melanda pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini globalisasi dipandang sebagai suatu tantangan sekaligus sebagai suatu proses yang dapat menimbulkan banyak akibat. Sebagai suatu proses, globalisasi berlangsung begitu cepat dan banyak mendatangkan kekacauan. Industri manufaktur ditinggalkan segera digantikan dengan perusahaan multinasional yang bergerak dalam industri dan jasa yang merambah berbagai penjuru dunia tanpa mengenal batas-batas negara nasional. Sebagai akibatnya pengangguran meningkat dan di pihak lain terbuka kesempatan kerja yang sangat luas, yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar anggota masyarakat kita karena menuntut kualifikasi tingkat tinggi. Dari sinilah kemudian muncul istilah *the loser* dan *the winner*, yang

menempatkan masyarakat negara berkembang sebagai pecundang dan masyarakat negara maju sebagai pemenang (Micklethwait & Wooldridge, 2000: xx).

Untuk dapat menempatkan diri sebagai pemenang, maka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sesuatu yang sangat penting artinya sebagai prasyarat mengantisipasi perubahan-perubahan agar suatu bangsa tidak ketinggalan. Perlu pula dinyatakan, bahwa eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi sangat diwarnai oleh perlombaan untuk mencapai puncak ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan itu Hatten & Rosenthal (2000: 5) menyatakan, bahwa penguasaan bidang ilmu dan teknologi dalam kadar yang memadai sangat diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan kreativitas, pengembangan, dan penerapan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) sebagai tuntutan yang mutlak dalam kehidupan global.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan yang terjadi, pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi sistem pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan dalam suatu pola pembinaan, yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai: 1) bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, 2) penghubung antara dunia iptek dan kebutuhan masyarakat, 3) upaya pengembangan pola analitik yang berorientasi pada pemecahan masalah dengan pandangan masa depan, 4) bentuk partisipasi dalam perbaikan dan pengembangan mutu kehidupan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan penerapannya, pengertian dan kerja sama internasional dalam upaya mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia, 5) upaya yang memungkinkan pengembangan seluruh kemampuan serta kepribadian manusia, mobilitas dalam memperoleh pengalaman pendidikan, diversifikasi, demokratisasi dalam pendidikan, proses belajar, mobilisasi sumber masyarakat untuk pendidikan dan pertumbuhan kegairahan kegiatan penelitian (Soedjatmoko, 1991: 143)

Dalam era globalisasi dewasa ini perubahan berlangsung begitu cepat. Masyarakat semakin sadar tantangan masa depan, sehingga berusaha membekali diri melalui penguasaan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dalam kaitan itu pula manusia Indonesia dituntut untuk peka

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat dalam segala lapangan kehidupan. Kiranya hanya dengan cara itulah masyarakat dapat memacu diri agar tetap eksis. Dalam kenyataannya globalisasi memang menuntut setiap orang untuk selalu meningkatkan kemampuan diri agar dapat memberi respon yang cepat dan tepat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Di samping itu harus pula memiliki harga diri dan kepercayaan kepada diri-sendiri berdasarkan iman yang kuat. Semua itu akan memungkinkan kesanggupan untuk mandiri untuk berprakarsa dan bersaing, baik secara lokal maupun secara global (Kartodirdjo, S., 1990: 18-19).

Pada dasarnya globalisasi yang berkembang cepat didorong oleh tiga faktor penting yang sering disebut *three engine of globalization*, yang meliputi teknologi, modal, dan manajemen. Ketiganya merupakan perangkat yang saling terkait satu sama lain. Perkembangan teknologi baru telah dapat memudahkan perpindahan dan perluasan modal dari suatu tempat ke tempat lain. Sementara itu dengan manajemen modern para ahli ekonomi telah mampu menyiapkan perusahaan dan mengatur strategi dalam rangka bekerja sama atau untuk memenangkan persaingan dengan didukung oleh modal dan teknologi. Manajemen modern yang canggih sudah tentu dapat mendorong para manajer untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik pula (Micklethwait & Wooldridge, 2000: 29).

Dalam era globalisasi telah terjadi paradigma yang sangat besar dalam sektor produktivitas yang menyangkut kekayaan suatu negara. Pada masa lampau kekayaan suatu negara dipandang berkait erat dengan sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki. Akan tetapi untuk ukuran sekarang, kekayaan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengubah sumber-sumber alam itu menjadi produk atau jasa yang berharga berdasarkan ilmu pengetahuan, investasi, gagasan, dan inovasi. Banyak sumber eksternal yang dulu menguntungkan suatu negara kini telah hilang karena arus perkembangan globalisasi (Harrison & Huntington, 2000: 5).

Dengan demikian penguasaan ilmu dan teknologi dalam era globalisasi sangat penting

artinya sebagai prasyarat untuk dapat mengantisipasi perubahan-perubahan, sehingga suatu bangsa tidak ketinggalan. Tidak heran jika berbagai bangsa dewasa ini juga diwarnai oleh perlombaan untuk menggapai puncak ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan itu Hatten & Rosenthal (2000: 5) menyatakan, bahwa penguasaan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dalam kadar yang memadai dapat melahirkan kemampuan kreativitas, mengembangkan dan menerapkan pengetahuannya itu sebagai suatu tuntutan yang mutlak dalam era globalisasi.

Konteks baru dalam peningkatan daya saing antar bangsa dewasa ini adalah kebutuhan untuk mengetahui segala perubahan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan penguasaan yang memadai bidang ilmu pengetahuan tersebut. Oleh sebab itu tidak heran jika berbagai bangsa dapat kita saksikan sangat antusias berlomba dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, termasuk menciptakan, mengembangkan, dan menggunakannya dalam rangka mencapai kesuksesan yang kompetitif. Bagi suatu bangsa maupun organisasi bisnis, penguasaan ilmu pengetahuan baru sangat penting artinya untuk dapat berpartisipasi dalam era global. Pihak yang pantas menjadi pemenang dalam persaingan global adalah mereka yang mengetahui (*knowing*) bagaimana cara bertahan hidup dan mengetahui bagaimana mengembangkan kemampuan berorganisasi (Hatten & Rosenthal, 2000: 7).

Kemudian untuk mencapai itu semua diperlukan banyak jalan. Salah satu yang dipandang sangat penting adalah pendidikan. Dalam kaitan ini pendidikan merupakan unsur penting yang harus mendapat prioritas utama. Dalam kerangka itulah, pendidikan diharapkan dapat memberi sumbangan perkembangan seutuhnya bagi setiap orang, baik jiwa, raga, intelegensi, kepekaan, estetika, tanggung jawab, dan nilai-nilai spiritual. Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Dalam dunia yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, pendidikan tampak sebagai salah satu kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas imajinasi dan kreativitas sebagai ungkapan dari kebebasan

manusia dan standarisasi tingkah laku perorangan. Kesempatan perlu diberikan kepada generasi muda untuk melakukan percobaan dan menemukan sesuatu yang baru (UNESCO, 1996: 94).

Lebih jauh Ohmae (1990: 195), menyatakan, bahwa setiap pemerintah yang bertanggung jawab akan mempersiapkan diri agar rakyatnya dapat memasuki era global dengan kesiapan yang mantap. Cara yang mungkin dapat ditempuh adalah menyelenggarakan pendidikan yang memungkinkan rakyat mendapatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang diperlukan. Penguasaan informasi dan penguasaan sebanyak mungkin pilihan pengetahuan akan memantapkan suatu bangsa untuk berkompetisi dalam era global.

Dengan demikian proses pendidikan bukan semata-mata untuk memperdalam pengetahuan, tetapi juga ditekankan untuk mempertinggi sikap kritis dan daya kreatif peserta didik. Hal ini sangat perlu mengingat keanekaragaman tantangan di masa depan sangat menuntut kemampuan semacam itu. Dewasa ini kita sering dituntut untuk mampu memberi jawaban dalam *response time* yang pendek dan sering kali suatu tantangan memerlukan beberapa jawaban sekaligus (Soedjatmoko, 1991: 87).

Kemudian untuk mencapai keberhasilan pendidikan pada era global, UNESCO menetapkan dasar-dasar yang harus dijadikan pijakan bagi semua bangsa. Tidak terkecuali Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia sangat perlu untuk mencermati dan menggunakan dasar-dasar pendidikan yang telah dicanangkan UNESCO. Dalam uraiannya yang bertajuk *Learning: Treasure Within* (1996: 85-89) UNESCO menetapkan *The four pillars education* (Empat pilar pendidikan) sebagai landasan pendidikan pada era global, sebagai berikut: 1) *Learning to know*, bukan sekedar mempelajari materi pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah mengenal cara memahami dan mengkomunikasikannya. 2) *Learning to do*, menumbuhkan semangat kreativitas, produktivitas, ketangguhan, menguasai kompetensi secara profesional, dan siap menghadapi situasi yang senantiasa berubah. 3) *Learning to be*, pengembangan potensi diri yang meliputi

kemandirian, kemampuan bernalar, imajinasi, kesadaran estetik, disiplin, dan tanggung jawab. 4) *Learning to live together*. Pemahaman hidup selaras seimbang, baik nasional maupun internasional dengan menghormati nilai spiritual dan tradisi kebhinekaan. Untuk dapat mewujudkan harapan itu tentu diperlukan pendidikan yang sesuai yang mengarah kepada pembentukan sikap kebersamaan.

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Secara teoretis proses integrasi etnis ke dalam nasionalis memerlukan waktu yang panjang. Setelah melalui tahapan tertentu mereka saling berasimilasi sehingga dapat berkembang kepada tahapan berikutnya. Proses seperti itu terjadi berulang-ulang, sehingga akhirnya berhasil membentuk nasionalisme dalam sebuah negara bangsa. Sudah tentu hal ini membutuhkan waktu dan kondisi-kondisi tertentu. Pada tahap awal cita-cita masyarakat multietnik dan multikultural dibentuk melalui proses asimilasi kelompok minoritas ke dalam kelompok dominan. Kemudian pada tahap berikutnya berbagai kelompok etnis mengasimilasikan dirinya sebagai etnis baru, sehingga terbentuklah suatu masyarakat bangsa sebagai hasil dari asimilasi tersebut. Proses seperti itu diabadikan dalam sebuah teori yang sangat terkenal, yaitu teori *melting pot* (Watson, 2004: 15).

Teori *melting pot* (kawah candradimuka) pada awalnya diwacanakan oleh J.Hektor seorang imigran Amerika yang berasal dari Normandia. Dalam teorinya dia menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asalnya, sehingga seluruh imigran Amerika pada akhirnya hanya memiliki satu budaya baru, yakni budaya Amerika. Walaupun sekarang diakui, bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestant* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih yang berasal dari Eropa. (Rosyada, 2010: 1).

Teori ini sangat terkenal di Amerika Serikat sebagai cerminan dari proses terbentuknya bangsa itu yang tidak saja multi etnis tetapi juga multi rasial menjadi satu bangsa yang kuat. Jika dicermati kelompok etnis/ras secara bertahap

datang ke Amerika Serikat untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun agama. Perjuangan dilakukan oleh beberapa etnis sejak mereka meninggalkan tanah leluhur sampai saat sekarang ini, ketika pluralisme etnis/ras dalam tubuh bangsa Amerika Serikat telah menjadi kenyataan dan diterima oleh berbagai pihak. Setiap kelompok etnis/ras memperlihatkan kegigihannya dalam menghadapi berbagai kesukaran. Setiap kelompok mampu mengatasi bermacam-macam kesulitan dan hal ini merupakan indikasi kuat bagi mereka untuk dapat tumbuh menjadi kelompok masyarakat yang tegar, percaya diri akan kemampuan dirinya, dan tinggi pula harga dirinya (Sowel, 1989: 8).

Dalam proses menuju integrasi antara etnis dalam masyarakat Amerika secara berangsur-angsur terbentuk filsafat hidup yang berjalan secara integrasional dan kumulatif. Proses terbinaanya suatu bangsa sampai sekarang merupakan proses yang panjang. Merupakan proses yang penuh prasangka buruk etnis kultural, tetapi dengan kearifan kolektif semua hambatan itu dapat diatasi. Bersamaan dengan itu terbentuk pula kemauan yang kuat untuk membentuk identitas kultural baru, yaitu identitas kultural Amerika Serikat yang bersifat multietnis/multirasial. Dalam masyarakat Amerika Serikat, kelompok-kelompok etnis/ras, seperti Inggris, Jerman, Irlandia, Yahudi, Italia, Negro, Jepang, Cina dan Indian, masing-masing juga mampu memberi sumbangan terhadap pertumbuhan budaya bangsa Amerika Serikat (Sowel, 1989: 8).

Kemudian ketika komposisi etnis Amerika kian beragam dan majemuk, kembali maka teori *melting pot* tidak sesuai lagi, sehingga muncul teori baru yang disebut teori *salad bowl* (gado-gado) sebagai teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Teori *salad bowl* tidak melelehkan budaya asal, tetapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodasi dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai sebuah budaya nasional. Prasyarat dari interaksi antar berbagai budaya etnis itu masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa. Hal ini kemudian melahirkan teori *Cultural Pluralism*, yang membagi ruang gerak budaya menjadi dua bentuk. Dua ruang gerak itu

adalah: 1) Ruang gerak publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. 2) Ruang gerak privat, yang di dalamnya berfungsi bagi mereka untuk mengespresikan budaya etnisitasnya secara leluasa (Rosyada, 2010: 1-2).

Teori-teori tersebut dikembangkan dalam rangka memperkuat bangsa Amerika, membangun persatuan dan kesatuan dan untuk mengembangkan kebangsaan warga negara Amerika Serikat. Namun demikian pada dekade 1960 an masih ada sebagian masyarakat Amerika yang merasa hak-hak sipilnya belum dapat dijamin sepenuhnya. Hal itu memunculkan pemikiran baru agar semua kelompok masyarakat dapat hidup nyaman, aman, teteram dan terjamin hak-haknya. Kelompok *Black America*, imigran dari Amerika Latin, atau kelompok minoritas lainnya memerlukan cara yang sesuai dengan tuntutan baru, karena cara-cara yang sudah ada tidak tepat lagi. Untuk kepentingan itu maka mereka mengembangkan teori *multiculturalism*, yang menekankan pada penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras, atau warna kulit. Pada hakekatnya multikulturalisme adalah sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, agama, ras, budaya, dan bahasa dengan menghormati dan menghargai hak-hak sipil mereka termasuk menghormati hak sipil kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam membangun suatu bangsa. Pada dasarnya mereka menjadi besar karena kebesaran bangsanya dan mereka memiliki kebanggaan terhadap kebesaran bangsanya itu (Rosyada, 2010: 2).

Di Indonesia sendiri sebagaimana telah dinyatakan di atas telah menyadari tentang adanya kemajemukan ragam etnik dan budaya masyarakatnya. Indonesia sebagai suatu negara didukung oleh beragam etni, budaya dan agama yang terbentuk oleh adanya persamaan nasib yang memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama ingin mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi gagasan besar

itu kemudian tenggelam dalam sejarah dan politik monokultur, baik yang dipraktekkan oleh Orde Lama maupun Orde Baru. Sistem Demokrasi Terpimpin yang diusung rezim Sukarno telah mematikan kreatifitas-kreatifitas lokal atau daerah yang berbasis etnik dan budaya tertentu. Kondisi pada periode Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto lebih parah lagi. Manajemen sentralistik yang dikembangkan rezim Suharto menjadikan filsafat Bhinneka Tunggal Ika hanya tinggal slogan belaka. Upaya untuk mencapainya tidak pernah terwujud dalam kenyataan empirik hubungan sosial maupun pranata sosial lainnya (Rosyada, 2010: 2).

Ketika simpul-simpul yang mengikat demokrasi terbuka pasca gerakan Reformasi, maka gagasan-gagasan yang berkaitan dengan multikulturalisme menjadi mengemuka dan langsung memasuki wilayah pendidikan dalam bentuk praktik. Seharusnya sebelum masuk pada tahapan realisasi, teori multikulturalisme di Indonesia dirumuskan terlebih dahulu oleh para ahli bidang sosial dan politik. Melalui teori yang dirumuskan itu akan memperoleh gambaran tipe ideal, jelas ruang lingkup dan batas-batasnya, serta bagaimana model pendidikan multikulturalisme yang seharusnya dilaksanakan. Atau setidaknya kita tidak akan dikacaukan oleh teori *melting pot*, *salad bowl* dan lainnya yang pernah dilaksanakan di Amerika Serikat. Sebenarnya Indonesia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan multi etnik, justru multikulturalisme menjadi common platform dalam mendesain pembelajaran yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika (Azra, 2003: 19).

Jika dianalisis sebenarnya ada perbedaan mendasar antara pendidikan berbasis multikultural dengan pendidikan berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pendidikan berbasis multikultural, menganjurkan kepada peserta didik untuk saling menghargai asal usul dan perbedaan masing-masing dalam suatu masyarakat. Pendidikan multikultural yang dipraktekkan di Amerika Serikat atau Australia (sekarang) tergolong sebagai *critical multiculturalism*, sementara pendidikan dengan pendekatan Bhinneka Tunggal Ika dikategorikan sebagai *soft multiculturalism* (Watson, 2004: 20).

Ciri dari critical multiculturalism saling menghadapkan antar perbedaan pendapat dan pandangan atau ketidakpahaman antar kelompok etnis, budaya, agama, dan perbedaan lain, sehingga akan terjadi perbenturan di antara mereka. Tujuannya agar mereka saling buka kartu dan secara terang-terangan menjelaskan dan menguraikan perbedaan pandangan. Dengan cara ini mereka maka akan terbuka ruang agar orang dapat berdialog dengan sungguh-sungguh dari tingkat anak-anak sampai orang dewasa. Dengan cara ini, secara berangsur-angsur mereka saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Salah satu hal yang diharapkan adalah akan munculnya suasana keterbukaan dan keinsafan diri sendiri atas perbedaan etnik, budaya, agama atas dasar pengalaman dan keyakinan sendiri (Watson, 2004: 20-21).

Sementara itu pendidikan yang berbasis Bhineka Tunggal Ika, tergolong sebagai pendidikan *soft multiculturalism*. Dalam pelaksanaannya pendidikan jenis ini digambarkan dengan suasana harmonis antar kelompok etnis, budaya, maupun agama. Dalam kenyataannya mereka itu tidak pernah ada ruang untuk saling berdialog secara serius dan terbuka tentang perbedaan masing-masing. Bentuk pendidikan yang sering dilakukan adalah dalam bentuk festival kesenian Nusantara, lagu-lagu daerah, pakaian adat, seperti yang sering dipertontonkan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), media TVRI dan acara perayaan hari besar nasional di sekolah maupun instansi lainnya. Kadang-kadang dilakukan pula dalam pembelajaran PKn, dengan cara guru mengenalkan perbedaan adat-istiadat di Indonesia. Pendidikan multikultural seperti ini tidak efektif untuk membentuk sikap dan pemahaman yang kritis, karena hanya bersifat seremonial belaka. *Soft multiculturalism* hanya dapat membuka mata kita tentang banyaknya variasi, jumlah, dan banyaknya pilihan adat istiadat, agama, budaya, etnis dan lain-lain. Akan tetapi tidak mungkin dapat meningkatkan kesadaran atas kepentingan nilai-nilai dan kepercayaan dalam kehidupan serta harga diri suatu komunitas. (Watson, 2004: 20-21). Untuk dapat mencapai tujuan yang ideal maka pendidikan multikultural harus dilaksanakan secara lebih kritis.

Harus diakui, bahwa permasalahan multikulturalisme masih merupakan ancaman bagi Indonesia. Sebagai bukti dalam sepuluh tahun terakhir ini masih saja terjadi peristiwa tragis yang melanda sejumlah daerah, yang disebabkan oleh perbedaan agama, budaya, suku atau etnis. Jadi adanya keberagaman di negeri ini masih berpotensi sebagai pemicu konflik dalam bentuk kekerasan, penyerangan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan, penangkapan, dan intimidasi. Permasalahan multikulturalisme yang tercermin dalam berbagai peristiwa sebenarnya merupakan produk sosial yang disebut *habitus*. Sering diartikan *habitus* sebagai suatu tindakan pengkondisian yang dikaitkan dengan keberadaan suatu kelas sosial, yaitu kelas dominan pemegang kekuasaan. Pengkondisian dapat dilakukan melalui media massa dan pendidikan, karena kedua elemen itu dipandang sebagai sarana yang sangat efektif untuk menyebar luaskan wacana (Kurniawan, 2010, : 1).

Berdasarkan pada kenyataan seperti itu maka perlu segera dicari jalan keluar agar multikultural tidak lagi menjadi masalah yang membahayakan bagi kehidupan dan keutuhan bangsa. Diperlukan upaya pengkondisian melalui bidang pendidikan kearah yang positif. Perlu segera diwacanakan, dirancang dan dilakukan kebijakan tentang pendidikan yang berbasis multikulturalisme yang kritis (*critical multiculturalism*).

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI TANTANGAN BARU DI INDONESIA

Dewasa ini disinyalir tengah terjadi disintegrasi bangsa yang ditengarai dengan munculnya perilaku anarkhis diberbagai daerah. Diduga salah satu penyebabnya adalah karena sebagian masyarakat tidak lagi untuk memahami sejarah bangsanya yang ditandai oleh semangat pluralisme yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga masyarakat yang merasa ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, sudah sepantasnya kita berbuat sesuatu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Harapan ini kiranya dapat dicapai apabila masyarakat terutama generasi mudanya sebagai

calon pemimpin masa depan memiliki kualitas integritas yang memadai. Untuk urusan masa depan mereka memang memegang peran yang sangat sentral.

Hal ini tercermin dalam pepatah lama, bahwa generasi muda adalah bunga dan harapan bangsa. Pepatah ini memiliki makna, bahwa generasi muda sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Agar dapat memenuhi harapan itu maka sedini mungkin mereka perlu mempersiapkan diri, sehingga pada saatnya nanti siap tampil sebagai pemimpin yang tangguh, baik secara fisik, intelektual, maupun moral. Sebagai bekal yang mutlak diperlukan adalah iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh melalui proses pendidikan secara sungguh-sungguh. Sebagai bunga dan harapan bangsa generasi muda dituntut pula untuk mempraktekkan budi pekerti yang luhur sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa.

Dengan budi pekerti yang luhur semacam itu para pemuda nantinya akan dapat menampilkan diri sebagai pemimpin yang berkualitas tinggi. Kesiapan mental dan ketinggian moral itu pada gilirannya merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk menunjang cita-cita yang mulia itu, salah satu sayaratnya diperlukan pemahaman nilai yang terkandung dalam sejarah bangsanya. Dengan pemahaman nilai semacam itu berarti upaya pembinaan dan pembangunan karakter bangsa (*nation building*) dapat berproses dengan baik. Melalui pelaksanaan pendidikan yang berbasis multikultural dapat diharapkan akan tertanam semangat rela berkorban dan semangat persatuan, yang semuanya mengacu kepada upaya menjaga dan memelihara keutuhan bangsa serta negara ini.

Pengalaman sejarah perlu disadari, bahwa untuk mewujudkan keutuhan bangsa harus dapat menjaga perpaduan tiga unsur, yaitu: 1) Kemauan untuk bersatu "*la desir d'etre esemble*" (Ernest Renan). 2) Merasa senasib dan sepenanggungan "*eine aus Schicksals-gemeinschaft erwachsente charakter-gemeinschaft*" (Otto Bouer), 3) Persatuan antara orang dan tempat sesuai dengan kenyataan Nusantara (Bung Karno). Dalam

kenyataannya keterikatan masyarakat Indonesia yang terdiri dari bernagai budaya dan etnis mengalami masa-masa surut, ketika menghadapi masa-masa sulit. Ketika dihadapkan pada Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti keanekaragaman kelompok, maka semboyan itu diyakini sebagai sumber kekuatan. Dua hal itu tampak merupakan kontradiksi., Betapa sulit memenuhi prasyarat nasionalisme jika benar-benar disadari kondisi yang dituntutnya. *Pertama*, setiap kelompok etnis secara mandiri mengolah keunggulan-keunggulan budayanya yang khas anggotanya (*diversity*). *Kedua*, keunggulan yang khas itu harus mendapat peluang yang sama (*equality*). *Ketiga*, tersedianya bidang-bidang persoalan, di mana keunggulan yang beraneka ragam itu bekerja sama menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar jumlahnya (Parakitri, 1993: 7).

Suatu bangsa yang dibangun berdasarkan pada keanekaragaman seperti Indonesia, jika mampu mewujudkan tiga kondisi itu akan tetap tampil sebagai kesatuan, kendati terdiri dari aneka ragam kelompok etnis dan budaya (status *diversitatis*). Itulah status Bhinneka Tunggal Ika. Jika sampai terjadi pengutamaan satu kelompok, maka kemampuan yang beragam (*diversity*) akan berubah menjadi perbedaan martabat (*hierarchi*). Bersamaan dengan itu, peluang yang sama (*equality*) berubah menjadi perlakuan pilih kasih (*discriminatory*). Dengan demikian koordinasi kemampuan (*synergy*) sirna oleh oleh pertarungan kemampuan (*contradictory*). Perubahan-perubahan semacam itu akan membawa negara nasional yang berdasar pada keberagaman kejurang permusuhan antar kelompok etnis (status *hostilis*) atau saling menghancurkan (status *belli*). Setelah itu negara bangsa akan hancur dan sebagai gantinya kemungkinan adalah negara wangsa (Parakitri, 1993: 8).

Untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini, maka perlu dikembangkan dan dipraktekkan pendidikan yang berbasis pada pendidikan multikultur. Seperti kita ketahui, bahwa pendidikan adalah merupakan usaha yang secara sengaja dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik dapat secara aktif

mengembangkan potensi dirinya. Dengan cara itu peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sementara itu, pendidikan multi kultur diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang sebagai usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan melalui cara-cara mendidik serta menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik (Suparsa, 2010: 1).

Pendidikan yang berorientasi pada multikultural harus dapat memberi pemahaman tentang keberadaan masyarakat plural yang membutuhkan ikatan-ikatan keadaban, yang berupa pergaulan antar budaya yang diikat oleh suatu peradaban. Tentu saja ikatan tersebut dibangun oleh nilai-nilai universal kemanusiaan, yang ditransfer kepada masyarakat agar menemukan tujuan kepemilikan dan kelanggengan. Kepemilikan nilai-nilai universal itu dapat melembaga dalam masyarakat untuk mewujudkan budaya luhur, sehingga akan tercipta masyarakat yang aman, tertib, berwibawa, dan bermartabat. Untuk dapat memahami pendidikan multikultural, perlu dipahami karakteristik budaya dan wilayah budaya. Pemahaman terhadap karakteristik budaya antara lain meliputi budaya sebagai suatu hal yang general sekaligus sebagai suatu yang spesifik. Di samping itu budaya juga merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, sebagai suatu simbol, sebagai milik bersama, sebagai atribut individu, budaya juga sebagai suatu model, dan budaya sebagai suatu yang bersifat adaptif (Suparsa, 2010: 1).

Mengenai wilayah budaya dapat diartikan sebagai :

1. Sub kultural, merupakan suatu perbedaan karakteristik budaya dalam suatu kelompok masyarakat.
2. Kultur Nasional, yang berbentuk aneka ragam pengalaman, sifat dan nilai-nilai yang digunakan oleh warga negara yang berada dalam suatu negara.
3. Kultur internasional, terbentuk dari tradisi kultural yang meluas melampaui batas-batas

wilayah nasional sebuah negara melalui proses penyebaran (*diffusion*), yaitu proses penggabungan antar dua kultur atau lebih melalui beberapa cara, seperti migrasi, perkawinan, media massa, atau bahkan film (Suparsa, 2010: 2).

Dalam era global dewasa ini pendidikan yang berbasis pada multikultural menjadi pilihan yang sangat penting. Hal ini mengingat pendidikan untuk memanusiakan manusia, sehingga perlu ditempuh langkah tertentu untuk mempertahankan visi dan misi pendidikan multikultural. Berkaitan dengan itu Suparsa (2010: 2) kengemukakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.
2. Menciptakan kelembagaan agar daerah mempunyai peranan keterlibatan yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Mendorong peran serta masyarakat termasuk lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha sebagai mitra dari pihak pemerintah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan.
4. Menyediakan fasilitas yang memadai agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, dinamis, kreatif, dan produktif.
5. Menciptakan sistem pendidikan yang proatif dan fleksibel.
6. Menciptakan suasana proses pembelajaran yang mampu membangkitkan dan menumbuhkembangkan kreativitas, membangun inovasi, serta minat dan semangat belajar.
7. Menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sejak pendidikan usia dini.
8. Menumbuhkembangkan daya juang, profesionalisme dan wawasan keunggulan .
9. Menumbuhkembangkan sikap hidup hemat, cermat, teliti, tekun dan disiplin.
10. Menumbuhkembangkan moral dan budi pekerti yang luhur sebagai perwujudan dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan.

Untuk memahami lebih jauh tentang pendidikan multikultural, perlu pula dikemukakan di sini tentang ideologi yang menjadi landasan pendidikan. Ideologi pendidikan merupakan nilai-

nilai landasan ideal yang harus diimplementasikan dalam seluruh aktivitas pendidikan. Salah satu ideologi pendidikan multikultural adalah Ideologi Sirkularisme. Ideologi Sirkularisme merupakan ideologi pendidikan yang memberikan perhatian terhadap hubungan yang setara antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ideologi ini menghendaki perlakuan segala sesuatu tepat pada hak-hak yang melekat pada obyeknya. Dengan demikian maka pendidikan multikultural terdapat beberapa pemahaman. Menurut Suparsa (2010: 3) perlu tiga pemahaman yaitu:

1. Pendidikan multikultural memandang dan meyakini pentingnya positioning, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan nilai keadilan dan keseimbangan.
2. Pemetaan dalam pendidikan multikultural sebagai suatu keniscayaan, untuk mencapai hasil sesuai dengan yang dikonsepsikan. Pemetaan berujung pada keragaman, heterogenitas, pluralitas, dan deversitas sebagai suatu keharusan dalam pendidikan multikultural.
3. Pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk membentuk jati diri seseorang, yang berupaya menyeragamkan seluruh aspek kemanusiaannya. Ciri khas pendidikan multikultural selalu menghadapi keragaman pluralistik, heterogenitas, etnik, agama, budaya, dan suku sehingga dapat mengangkat potensi seseorang dengan jati dirinya masing-masing

Untuk dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan yang berbasis multikultural memerlukan guru dengan kahraktaristik tertentu. Menurut Aldridge (dalam Rosyada, 2010: 10), adalah sebagai berikut:

1. Guru harus mampu menciptakan situasi kelas yang tenang, bersih, tidak stress, dan sangat mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran.
2. Guru harus menyediakan peluang bagi para siswa untuk mengakses seluruh bahan dan sumber informasi untuk belajar.
3. Guru perlu menggunakan model *cooperative learning* melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, debat, atau *rool playing*.

4. Guru harus mampu menghubungkan informasi baru pada sesuatu yang sudah diketahui oleh siswa, sehingga mudah untuk mereka pahami.
5. Guru harus mampu mendorong siswa untuk mengerjakan tugas-tugas, dengan melakukan kajian dan penelusuran pada hal-hal baru dan mendalam.
6. Guru harus memiliki catatan-catatan kemajuan dari semua proses pembelajaran siswa, tugas-tugas individual, sehingga dapat melakukan evaluasi dalam bentuk portofolio.

Standar Kompetensi pendidikan yang berbasis multikultural dapat ditetapkan sebagai berikut: *Menjadi warga negara yang mampu hidup berdampingan bersama warga negara lainnya tanpa membedakan agama, ras, bahasa dan budaya dengan menghormati hak-hak mereka, memberi peluang kepada semua kelompok untuk mengembangkan budayanya serta mampu mengembangkan kerja sama untuk mengembangkan bangsa menjadi bangsa besar yang dihormati dan disegani di dunia internasional.*

Dari Standar Kompetensi tersebut dapat pula dirinci Kompetensi Dasarnya, sebagai berikut:

1. Menjadi warga negara yang menerima dan menghargai perbedaan etnik, agama, bahasa dan budaya dalam struktur masyarakat.
2. Menjadi warga nnegara yang dapat melakukan kerja sama multi etnik, multi kultur, dan multi religi dalam konteks pengembangan ekonomi dan kekuatan bangsa.
3. Menjadi warga negara yang mampu menghormati hak-hak individu warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, pilitik dan lainnya, bahkan untuk memelihara bahasa dan mengembangkan budaya mereka.
4. Menjadi warga negara yang memberi peluang pada semua warga negara untuk terwakili gagasan dan aspirasinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.
5. Menjadi warga negara yang mampu mengembangkan sikap adil dan mengembangkan rasa keadilan terhadap semua warga negara tanpa membedakan latar

belakang etnik, agama, bahasa dan budaya mereka.

Dari lima Kompetensi Dasar tersebut tampak tidak ada pertentangan dengan norma hukum maupun etika dalam ajaran Agama Islam ataupun pemikiran keagamaan yang dikemukakan oleh para ulama. Bahkan kini sudah teradopsi sebagai nilai-nilai bangsa yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam mengembangkan perilaku atau kebijakan dalam kehidupan sosial (Rosyada, 2010: 6).

Namun demikian pendidikan dengan pendekatan multikultural sebagai salah satu upaya menjembatani kesenjangan antara keanekaragaman budaya dan etnik di Indonesia yang semakin diperparah dengan petkembangan budaya global, tentu masih memiliki kelemahan-kelemahan. Hal ini disebabkan proses sintesa dalam pembentukan budaya nasional masih berlangsung dan baru berada pada tahap transisi. Sementara itu masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang lebih kompleks dan skalanya lebih besar, yaitu ekspansi budaya global yang ditandai dengan segala kecanggihan sistem liberal, ekonomi, teknologi, dan jaringan komunikasi modern yang mendukungnya (Ohmae, 1995: 3). Dengan demikian terjadilah suatu interaksi kebudayaan yang sangat pesat dan menyeluruh, yang mampu mengguncang simpul-simpul serat budaya etnis dan nasional yang sedang dalam proses metamorfose pembentukan identitas baru. Sifat-sifat agresif budaya global ini sering dirasakan sebagai imperialisme baru yang tidak jarang pula ditafsirkan sebagai suatu ancaman yang tak terhindarkan. Anggapan yang negatif terhadap budaya global mengakibatkan munculnya reaksi primordial dan emosional dengan cara mengisolasi diri maupun perlawanan agresif lainnya.

Menurut I Made Suparsa (2010: 7-8), permasalahan pendidikan multikultural dalam masyarakat berkaitan dengan proses, fungsi, dan hasil pendidikan, antara lain:

1. Fungsi dan tujuan pendidikan multikultural dianggap kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan.

2. Prinsip pendidikan multikultural kurang menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, dan hak azasi manusia.

3. Evaluasi pendidikan multikultural dalam rangka pengendalian mutu secara nasional seringkali dibelokkan untuk kepentingan tertentu.

Oleh sebab itu untuk dapat mengantisipasi berbagai kelemahan yang ada, perlu dikembangkan model pendidikan multikultural yang sesuai, agar generasi muda mampu berkembang dan hidup harmonis di tengah-tengah beragamnya budaya, baik budaya etnis maupun budaya global. Penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada multikultural didasari oleh kerangka tujuan pendidikan nasional, yang tercermin dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa "*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak didkriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*". Dengan mengurangi beberapa kelemahan yang ada, diharapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis multikultural, mampu mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai

PENUTUP

Ditinjau dari segi sosial budaya dalam era global seperti sekarang ini, Indonesia masih dihadapkan pada dua tantangan besar, yaitu tantangan yang berupa proses integrasi keberagaman budaya, agama, dan etnis dan yang kedua adalah tantangan dari masuknya arus budaya global yang bersifat ekspansif. Kedua tantangan tersebut perlu mendapat perhatian serius, agar Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai negara bangsa. Hal ini merupakan tugas penting bidang pendidikan yang harus tampil sebagai ujung tombak penentu masa depan bangsa.

Melalui pendidikan dengan pendekatan multikultural, dunia pendidikan dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang demokratis, memahami dan menghargai pebedaan dan keanekaragaman budaya dan etnis yang ada dalam masyarakat, serta mampu mengikuti

kemajuan ilmu dan teknologi. Hal ini sesuai dengan jiwa UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan, bahwa pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, maka perlu segera dirancang dan ditetapkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan tantangan yang tengah dihadapi, baik tantangan dari dalam maupun dari luar. Di samping itu individu-individu yang ada dalam organisasi pendidikan harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mengemban tugas nasional. Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan serangkaian tugas sesuai dengan fungsi yang harus dijalankannya. Sebagai seorang manajer pembelajaran guru berkewajiban memberi pelayanan kepada siswanya terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Guru harus menguasai materi pelajaran, strategi dan model pembelajaran, serta kemampuan pembimbingan kepada siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2003, *Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika*, dalam Tsaqofah, Vol. I, No. 2, tahun 2003.
- Dediknas, 2003, *Undang-Undang R I Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung, Citra Umbara.
- Depdiknas, 2008, *Stan Pembangunan Pendidikan Nasional*, Jakarta, Depdiknas.
- Hatten, K.J., & Rosenthal, S.R., 2001, *Reaching for the Knowledge Edge*, New York, American Management Association.
- Harrison, L.E., & Huntington, S.P., 2000, *Cultures Matters*, New York, Basic Books.
- Ohmae, K., 1995, *The End of the Nation State; The Rise of Regional Economies*, New York, The Free Press.
- Parakitri, 1993, *Negara Bangsa atau Negara Wangsa*, Salatiga. Seminar tentang Nasionalisme.
- Kartodirdjo, S., 1991, *Fungsi Sejarah Dalam Pembangunan Bangsa: Kesadaran Sejarah, Identitas, dan Kepribadian Nasional*, Semarang, Seminar Sejarah Nasional V.
- Kayam, U., 1981, *Transformasi Budaya Kita*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Kurniawan, Hilda, 2010, *Media Pendidikan Dan Multikulturalisme*:
<http://komjakarta.org/media-pendidikan-dan-multukulturalisme.htm#more>
- Natsir, M., 2010, *Mencari Corak Perdamaian Dengan Sistem Multikultur*;
<http://ace-informasibudaya.blogspot.com/2010/01/perdamaian-sistem-kultur.html>
- Rosyada, Dede, 2010, *Pendidikan Multikultural Melalui Pendidikan Agama Sebuah Gagasan Konsepsional*:
<http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&q=MULTI+KULTUR&start=30&sa=N>
- Soedjatmoko, 1999, *Keprihatinan Tentang Masa Depan*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Suparsa, I Made, 2010, *peranan Multikultur Dalam Pendidikan Nasional*;
<http://suparsa.blogspot.com/2010/01/peranan-multicultur-dalam-pendidikan.html>
- Sowell, Thomas, 1989, *Mosaik Amerika: Sejarah Etnis Sebuah Bangsa*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Supriadi, D., 2000, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Adicita.
- UNESCO, 1996, *Learning: Treasure Within*, New York, UNESCO Publishing.
- Undang-Undang Dasar 1945 Dan Amandemennya*, 2008, Jakarta, Media Centre.
- Watson, Bill, 2004, *Multiculturalism: Its Strength and Weaknesses*, dalam JPIPS, No.23, Tahun XIII, Desember 2004.